

## Tak Ada Pagu Anggaran, Hanya Bisa Beri Sertifikat

**CIBINONG (IM)** - Mengaku tak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021, Bupati Bogor, Ade Yasin hanya bisa memberikan sertifikat penghargaan kepada Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas yang bekerja keras dalam penanganan wabah virus korona (Covid 19).

"Karena tak masuk dalam pagu APBD tahun ini, Pemkab Bogor hanya bisa memberikan sertifikat penghargaan saja. Dengan penghargaan ini bukti kami mengapresiasi kerja keras mereka dalam menangani wabah Covid 19 dan semoga mereka bertambah semangat," ucap Ade kepada wartawan, Selasa (2/3).

Wanita yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Bogor ini menerangkan setiap kecamatan akan ada satu Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, satu orang Babinsa dan satu orang Bhabinkamtibmas yang terpilih untuk mendapatkan piagam penghargaan pejuang Covid 19.

"Masing-masing kecamatan yang dipilih hanya satu orang Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Berkat upaya mereka selain Kecamatan Cibinong, Bojonggede, Gunung Putri, Cileungsi, Citeureup dan daerah penyangga tingkat penyebaran wabah Covid 19 sudah bisa dikatakan melandai angkanya," terangnya. ● **gio**

## Ridwan Kamil: Banyak Investasi Dibandingkan Investasi Miras

**BANDUNG (IM)** - Rencana Presiden Jokowi yang membuka peluang bagi investor di bidang usaha minuman keras (miras) di Indonesia, terus menuai polemik di sejumlah daerah. Karena, semua sepakat keberadaan investasi tersebut akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif ketimbang hal positif dari segi pemasukan negara.

Salah satu tokoh yang ikut berkomentar menolak Perpres tersebut adalah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil menilai, untuk menumbuhkan pendapatan negara dari segi investasi, masih banyak sektor yang bisa dimanfaatkan ketimbang membangun industri miras.

"Dalam pandangan saya un-

tuk memajukan Indonesia banyak investasi (yang lebih bermanfaat) dibandingkan miras," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan, Selasa (2/3).

Namun, Emil mengatakan, menunggu pertemuan antara para pemuka agama yang rencananya akan membahas terkait dengan Perpres industri minuman tersebut.

Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Dengan kebijakan itu, industri miras dapat menjadi ladang investasi asing, domestik, hingga diperjualbelikan secara ceceran. ● **pur**

IDN/ANTARA



**VAKSINASI COVID-19 BAGI PETUGAS PUBLIK BANDUNG** Petugas tenaga kesehatan berdiri di depan video penggunaan Vaksin saat pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi petugas pelayanan publik di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/3). Sedikitnya 350 petugas publik Kota Bandung yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara, tenaga pengajar dan tokoh agama menerima vaksin Covid-19 tahap kedua dosis pertama.

## Ratusan Warga Bandung Alami Efek Samping Setelah Divaksin

**BANDUNG (IM)** - Sebanyak 245 warga Bandung, Jawa Barat, mengalami efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Kendati begitu, mayoritas KIPI beberapa ringan tanpa efek samping kronis.

"Kita sudah menemukan 245 dengan KIPI tapi semuanya alhamdulillah KIPI ringan. Contoh ada gatal, bengkak, pusing. Tapi alhamdulillah semuanya ringan tertangani dengan beristirahat," terang Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, dr. Rosyie Arosdiani, Selasa (2/3).

Dia memastikan, sampai saat ini tidak ada warga yang telah

divaksin mengalami efek kronis. Dinkes Bandung, kata dia, terus memantau kondisi warga yang divaksin.

Diketahui, Kota Bandung telah menggelar program vaksinasi Covid-19 sejak Januari 2021 lalu. Sebanyak 28.117 orang Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) pun telah menerima suntikan tahap pertama vaksin Covid-19.

Sedangkan pada tahap dua vaksinasi Covid-19, Rosyie, mencatat baru sebanyak 1.318 orang telah menerima suntikan dosis pertama.

Mereka terdiri dari pejabat pelayanan publik, pedagang pasar, tokoh agama, akademisi, dan lansia. ● **pur**

## Setengah Bulan, 3.496 Penumpang Terlayani GeNose C19

**CIREBON (IM)** - Layanan pemeriksaan GeNose C19 di Stasiun Cirebon sudah berlangsung selama setengah bulan. Minat para calon penumpang untuk memilih layanan pemeriksaan GeNose pun sangat tinggi.

Manager Humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Suprpto, menyebutkan, sejak diluncurkan pada 15 Februari hingga 1 Maret 2021, tercatat ada 3.496 penumpang di Stasiun Cirebon yang memilih layanan GeNose. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan penumpang yang menggunakan pelayanan tes Rapid Antigen, yang hanya 336 penumpang, dalam rentang waktu yang sama.

"Layanan GeNose di Stasiun Cirebon tarifnya Rp 20 ribu. Untuk tarif tes Rapid Antigen sebesar Rp 105 ribu," kata Suprpto, Selasa (2/3).

Dalam layanan GeNose, selama 30 menit sebelum pemeriksaan, calon penumpang dilarang merokok, makan, dan minum (kecuali air putih) untuk menin-

gkatkan akurasi hasil pemeriksaan. Saat pelaksanaannya, calon penumpang diminta untuk menip kantong hingga penuh dan mengikuti arahan dari petugas atau petunjuk yang ada di lokasi pemeriksaan.

Jika nanti didapatkan hasilnya positif, calon penumpang tidak diperbolehkan naik Kereta Api. Tiket dapat dibatalkan melalui loket khusus atau melalui WhatsApp KAI21 di 081-1121-1121. "Uang tiket akan dikembalikan penuh," kata Suprpto.

Suprpto mengatakan, kehadiran layanan tes GeNose telah memberikan pilihan kepada para penumpang dalam memilih tes bebas Covid-19. Sebelumnya, di stasiun menyediakan layanan tes Rapid Antigen.

Di Wilayah PT KAI Daop 3 Cirebon, layanan GeNose baru tersedia di Stasiun Cirebon. Sedangkan layanan Test Rapid Antigen, disediakan di Stasiun Cirebon, Stasiun Cirebon Prujakan dan Stasiun Jatibarang. ● **pra**

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

## PUSAT PERBELANJAAN TERDAMPAK PANDEMI

Seorang pedagang tertidur di pusat perbelanjaan ITC Kebon Kalapa, Bandung Jawa Barat, Selasa (2/3). Paguyuban pedagang ITC Kebon Kalapa menyatakan, selama pandemi Covid-19 dari 2.500 pedagang di pusat perlengkapan fashion, elektronik dan batu akik tersebut hanya 700 pedagang yang bertahan, sementara sisanya memilih untuk menjual dan mengontrak kiosnya.

## POSITIF COVID-19 TURUN

# Aturan Ganjil Genap di Kota Bogor Ditiadakan Dua Pekan

Angka Covid-19 trennya turun terus, angka kesembuhan naik, angka kematian juga turun, angka keterisian tempat tidur atau BOR juga turun semakin membaik. Dari semua indikator itu semakin membaik. Karena itu, pihak Pemkot Bogor dua minggu ke depan meniadakan ganjil genap sambil dievaluasi, kata Wali Kota Bogor, Bima Arya.

**BOGOR (IM)** - Aturan ganjil genap bagi kendaraan roda dua dan roda empat di wilayah Kota Bogor untuk dua pekan ke depan ditiadakan. Hal tersebut karena tren penurunan kasus positif Covid-19 menurun.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah melakukan rapat evaluasi Satgas Covid-19 Kota Bogor. Hasilnya, sepekan terakhir data menunjukkan semua indikator baik.

"Angka Covid-19 trennya turun terus, angka kesembuhan naik, angka kematian juga turun, angka keterisian tempat tidur atau BOR juga turun semakin membaik. Dari semua indikator itu semakin

membaik," kata Bima kepada wartawan, Selasa (2/3).

Menurut Bima, kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor atau kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan. Mulai dari vaksin, pengendalian pada skala mikro hingga aturan ganjil genap kendaraan.

"Karena itu, karena langkah-langkah kita ini selalu terukur dari data-data, maka kami dua minggu ke depan meniadakan ganjil genap sambil kita evaluasi. Karena kita ingin rem dan gas ini dilakukan tepat sesuai dengan data-data tadi," ungkap Bima.

Selain itu, ditiadaknya ganjil genap juga sebagai relaksasi di bidang ekonomi di wilayah Kota Bogor. Mulai dari hotel, pasar hingga restoran.

"Jadi ada sedikit relaksasi ke depan, untuk mendorong ekonomi walaupun sebetulnya mulai membaik juga. Tetapi karena datanya seperti itu, minggu ke depan ganjil genap tidak dilanjutkan," jelasnya.

Kemudian, untuk jam operasional tempat usaha masih sama dengan sebelumnya sampai pukul 21.00 WIB. Itu disesuaikan dengan aturan pemerintah pusat.

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan meski tidak ada ganjil genap, Car Free Crowd (CFR) masih ada.

"Ganjil genap tidak diberlakukan, tapi CFR itu masih berlaku. Kalau ada ruas jalan yang padat bisa jadi kita lakukan penutupan sementara atau cara lain agar mengurangi kepadatan," ucap Susatyo.

Ia pun mengingatkan dengan tidak dilanjutkannya ganjil genap selama dua minggu ke depan bukan berarti masyarakat boleh tidak disiplin dalam protokol kesehatan. Jika angka covid-19 kembali naik bukan tidak mungkin ganjil genap kembali diterapkan.

"Melalui penundaan atau

relaksasi ini tidak membuat masyarakat Kota Bogor menjadi tidak disiplin. Kalau sudah tertata mengerti dan sebagian-

ya tetap. Kalau nanti angka naik lagi, maka 2 minggu ke depan bisa jadi kami akan kembali ganjil genap," tutupnya. ● **gio**

## Kasus Covid-19 di Kota Bogor Lampau Perkiraan

**BOGOR (IM)** - Akumulasi pasien positif Covid-19 di Kota Bogor mencapai 12.131 orang, hingga Senin (1/3), yakni jauh melampaui perkiraan Wali Kota Bogor, Bima Arya saat menjadi pembicara pada sebuah talk show di Jakarta. Berdasarkan Data Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kota Bogor, akumulasi pasien kasus positif Covid-19 di Kota Bogor mencapai 12.131 orang, setelah mendapat tambahan 55 kasus positif Covid-19 yang baru terkonfirmasi pada hari ini.

Dari jumlah 12.131 orang tersebut, sebanyak 10.766 pasien positif Covid-19 telah dinyatakan sembuh, 200 kasus positif meninggal dunia, serta 1.165 kasus positif masih sakit dan dalam perawatan.

Dari jumlah 1.165 kasus positif Covid-19 yang dirawat, 41 di antaranya anak balita serta 31 kasus orang lanjut usia (lansia) berusia 70 tahun ke atas.

Sebelumnya, pada sebuah talkshow yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB), di Jakarta, pada Senin, 25 Januari 2021, Bima Arya menyatakan, akumulasi kasus positif Covid-19 bisa mencapai sekitar 11.000 kasus pada akhir tahun 2021. "Dengan catatan, jika efektivitas vaksin Covid-19 berada pada kisaran 80 persen," katanya.

Menurut Bima Arya, pada diskusi bertajuk "Update RS Darurat Wisma Atlet: Kesiapan Rumah Sakit Darurat Daerah" tersebut, prediksi yang disampaikan di perolehnya dari perhitungan ahli epidemiologi yang kemudian dikalkulasikan oleh tim dari Pemerintah Kota Bogor.

Bima menjelaskan berdasarkan kalkulasi tim dari Pemerintah Kota Bogor, jika tingkat efektivitas vaksin Covid-19 pada kisaran 80 persen, maka kemungkinan besar pada akhir tahun 2021, akumulasi kasus positif Covid-19 ada sekitar 11.000 kasus. "Artinya jumlah target sasaran yang divaksin itu terpenuhi di Kota Bogor, yakni usia produktif, kemudian angkanya juga baik," katanya. ● **gio**

## Angin Puting Beliung Terjang Bogor, Puluhan Rumah dan RSUD Rusak

**CIBINONG (IM)** - Angin puting beliung merusak puluhan rumah warga di wilayah Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Aris Nurjatmiko mengatakan, bencana angin puting beliung melanda wilayah tersebut pukul 16.30 WIB, Senin 1 Maret 2021 kemarin.

"Ada enam kampung di Kecamatan Leuwiliang yang terdampak angin kencang (puting beliung)," kata Aris, Selasa (2/3).

Enam kampung tersebut yakni Mekarsari, Hergarsari II, Sawah, Sawah Kulon, Sukadamai dan Kaum. Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 80 rumah warga mengalami kerusakan.

"Itu data sementara. Masih assessment," tambah Aris.

Angin puting beliung juga membuat pohon tumbang dan menimpa rumah warga di samping RSUD Leuwiliang. Bahkan, bagian atap dan plafon Ruang Anelir 2 di rumah sakit tersebut rusak tertumpuk.

"Tidak ada korban jiwa. Untuk pasien yang berada di Ruang Anelir sudah dipindahkan ke Ruang Matahari sebanyak 12 pasien," jelas Aris.

Saat ini, pihaknya bersama aparat gabungan lainnya masih melakukan penanganan dan pendataan dampak dari puting beliung. Termasuk menyulurkan bantuan dasar kepada warga yang terdampak.

"Kami sudah koordinasi dengan Muspika Kecamatan Leuwiliang dan melaksanakan pertolongan darurat sesuai SOP kebencanaan," pungkasnya. ● **gio**

## Wabup Lebak Buka TMMD ke- 110

**LEBAK (IM)** - Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-110 tahun 2021 Kodim 0603 Kabupaten Lebak resmi dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi di Aula Makodim Lebak, Selasa (2/3).

TMMD akan Berlangsung selama satu bulan akan membuka jalan pedesaan penghubung antara desa Gunung Anten dengan Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, yang totalnya sepanjang 6 kilometer.

"Kita buka dan bangun jalan pedesaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan TNI juga ingin membangun kerja sama, kekompakan dan manunggal dengan aparat pemerintahan maupun masyarakat," ujar Dandim 0603 Lebak, Letkol Inf Nur Wahyudi saat sambu-



Wabup Lebak, saat membuka program TMMD ke-110 Kodim 0603 Kabupaten Lebak di Aula Makodim Lebak, Selasa (2/3).

Kata Nur Wahyudi, kondisi akses jalan yang akan dibuka semuanya merupakan hutan dan pesawahan warga yang hanya bisa dilalui jalan setapak.

"Kita buka dengan lebar 8 meter jadi kendaraan bisa masuk. Ekonomi warga juga mulai bergeliat," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati, Lebak Ade Sumardi, berharap adanya pertumbuhan

ekonomi setelah dibukanya akses jalan pedesaan melalui program TMMD ke 110.

"Saya meyakini setelah akses jalan dibuka akan membantu perekonomian masyarakat," ujarnya.

Hadir dalam acara Danrem 064/ Maulana Yusuf, Brigjen TNI Gumuruh Winardjatmiko, tokoh masyarakat Banten Mulyadi Jayabaya dan perwakilan Pangdam III Siliwangi. ● **nov**

## Komisi I DPRD Jabar Mengkaji Kerjasama TPPAS Legok Nangka



**BANDUNG (IM)** - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman mengungkapkan, pihaknya berencana melakukan kajian kerjasama Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka dengan kabupaten/kota. Menurutnya rencana kajian tersebut, akan melibatkan Komisi-Komisi terkait lainnya.

Kajian-kajian ini memang tidak cukup dengan hanya komisi 1 saja, kelihatannya harus lintas ke komisi lain

seperti komisi 3 dan komisi 4 karena di situ ada infrastruktur fisik dan dalam masalah pemerintah memiliki kewajiban dalam pembayaran tipping fee oleh provinsi, kata Bedi sesuai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Jumat (26/2) lalu.

Dikatakan, mengingat kebutuhan akan keberadaan TPPAS tersebut sudah sangat dibutuhkan, pihaknya berharap, persiapan mulai dari hilir dimulai dari pengambi-

lan sampah dan sebagainya terdapat perubahan yang signifikan dari pengolahannya. Karena menurutnya, sampah adalah wajah peradaban.

Pihaknya pun mengimbau, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat terbuka karena TPPAS Legok Nangka adalah bagian dari proyek Strategis

Nasional.

"Intinya kita mendukung, waktunya memang dibatasi karena akan habis masa kontrak dengan TPSA Sari Mukti jadi ini sangat penting.

Karena ini memang investasi swasta 100% tapi pemerintah punya kewajiban untuk bayar per tahunnya

hingga 20 tahun, maka ini perlu dikaji juga," ujarnya.

"Kita lihat efisiennya bagaimana jika menggunakan skema tersebut. Bagi daerah-daerah yang diajak kerjasama dan performa keuangan pemerintah provinsi juga" ucapnya menambahkan. ● **lys**

